



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**G20 dan Krisis Zona Euro**

Skripsi

Oleh

Ferry Wangsa Saputra

2013330034

Bandung

2017



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**G20 dan Krisis Zona Euro**

Skripsi

Oleh

Ferry Wangsa Saputra

2013330034

Pembimbing

Yulius Purwadi Hermawan, Drs., MA., Ph.D.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Ferry Wangsa Saputra  
Nomor Pokok : 2013330034  
Judul : G20 dan Krisis Zona Euro

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 13 Januari 2017  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

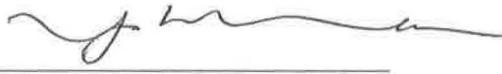
**Ketua sidang merangkap anggota**

Dr. A. Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A

: 

**Sekretaris**

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D.

: 

**Anggota**

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ferry Wangsa Saputra  
NPM : 2013330034  
Jurusan /Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : G20 dan Krisis Zona Euro

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Januari 2017



Ferry Wangsa Saputra

## Abstrak

Name : Ferry Wangsa Saputra  
NPM : 2013330034  
Judul : G20 dan Krisis Zona Euro

---

Krisis ekonomi merupakan salah satu permasalahan utama dalam hubungan internasional. Untuk menangani krisis ekonomi di dunia, maka negara-negara dengan ekonomi paling berpengaruh di dunia membentuk G20 (*Group of 20*). G20 berhasil memberikan dampak yang besar dalam penanganan krisis di Amerika Serikat, namun tidak melakukan hal yang sama dalam menghadapi krisis di zona euro. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori liberalisme institusionalis dan menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersumber pada studi pustaka. Penelitian ini berfokus pada bagaimana G20 sebagai penangan krisis enggan dalam menangani krisis di zona euro

Setidaknya ada tiga penyebab yang membuat G20 enggan dalam menangani krisis zona euro. Penyebab pertama adalah adanya kepentingan negara-negara berkembang G20 di dalam IMF (*International Monetary Fund*). Penyebab kedua adalah adanya kepentingan Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam menangani krisis euro. Penyebab ketiga adalah adanya hambatan struktural bagi G20 untuk melakukan intervensi kepada negara-negara sumber krisis. Kepentingan-kepentingan negara berkembang G20 dapat dilihat dari kepentingan BRICS untuk membantu Eropa melalui IMF, hal ini bertujuan agar negara-negara BRICS mempunyai peningkatan *voting power* di dalam IMF. Kepentingan Amerika Serikat dalam penanganan krisis euro adalah untuk dengan segera menyelesaikan krisis tersebut tanpa harus mengeluarkan sumber daya finansial apapun. Amerika sangat serius menekan Uni Eropa untuk menyelesaikan krisis ini karena adanya kepentingan baik ekonomi dan politik Amerika Serikat yang bergantung kepada kestabilan Uni Eropa. Kepentingan Uni Eropa adalah untuk menstabilkan perekonomian Eropa sesuai dengan mandatnya dalam *Treaty of the European Union*. Hambatan struktural yang harus dihadapi G20 adalah dalam menghadapi negara sumber krisis yang tidak tergabung dalam G20 dan adanya keunikan sistem ekonomi negara-negara pengguna euro yang mempunyai otoritas ganda dalam kebijakan fiskal dan moneternya.

Kata Kunci: G20, Krisis, Euro, Kerjasama

## ***Abstract***

Name : Ferry Wangsa Saputra  
NPM : 2013330034  
Judul : *G20 and The Euro Zone Crisis*

---

*Economic crisis is one of the main problem in the international relations. Therefore, to manage the world's economic crisis problem, countries with the strong economic influence form Group of 20 or G20. The G20 had successfully given its influence in handling the United States crisis, but failed to do the same when handling the Euro Zone crisis. In this research, author uses institutionalist liberalism theory and qualitative research method and as well as using literature review as its source. This research will focuses on how G20 as crisis resolver be reluctant to manage eurozone crisis.*

*There are at least three reason why G20 be reluctant to manage eurozone crisis. The first is because of the interest of the developing countries of G20 in the IMF (International Monetary Fund). The second reason is because the interest of The United States of America and European Union in managing the Euro Zone Crisis. The third reason is because of the structural barrier that hinder G20 in doing intervention to the states that had become the source of crisis. The interest of the developing countries in G20 can be seen from the BRICS' interest in aiding Europe through IMF, with the intention that BRICS member will receive boost in their voting power in the IMF. America's interest in handling the crisis is to solve the crisis without having to sacrifice any financial resources of any kind, with the United States pushing the European Union to solve the problem because of the economic and political interest of the United States that depends on the stability of the EU. While the European Union's interest is to stabilize the European economy as written on their mandate in Treaty of the European Union. Structural obstacle that G20 has to face is to handle states the has become source of crisis who are not member of G20 and the uniqueness of the economic system of states that uses Euro as their currency that has double authority on their both fiscal and monetary policies.*

*Keynote: G20, Crisis, Euro, Cooperation*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkatNya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini akan membahas tentang alasan dari keengganan G20 dalam menangani krisis di *eurozone*. G20 merupakan sebuah forum kerjasama yang dibentuk untuk menangani krisis ekonomi global dan menjaga kestabilan ekonomi dunia. Pada tahun 2008, G20 mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik saat menangani krisis ekonomi Amerika Serikat. Namun, G20 justru terlihat enggan dalam menangani krisis *eurozone* di Eropa. Oleh karena itu penelitian ini akan menjabarkan faktor-faktor apa saja yang mendorong G20 untuk enggan dalam menangani krisis *eurozone*.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan damai sejahtera yang sudah diberikan. Amin. *You're the best !*
2. Orang tua penulis yang sudah membiayai dan mendukung studi di UNPAR hingga akhir.
3. Mas Purwadi selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan banyak masukan. Semoga Mas Pur terus berkontribusi untuk G20.

*Thanks a lot !*

4. Untuk KANE *squad* (Yodi, Tika, CS, Gebih) yang sudah memberi semangat dan liburan yang menyenangkan ☺ Buruan pada lulus biar cepet jalan-jalan lagi kita.
5. Untuk inti Mentor Chevalier 2016 (Fadhil, Aji, Andra, Kintan dan Vania). Terima kasih untuk kebersamaannya terutama satu tahun terakhir dalam mengurus mentor. Kalian teman dan rekan kerja terbaik! Aji, Andra, Kintan cepat nyusul yah. Cuma satu yang harus diingat, kalau bikin acara jangan cuma beda seminggu! Ribet!
6. Kepada seluruh rekan-rekan mentor Chevalier 2016. Terima kasih sudah mengisi satu tahun terakhir di HI UNPAR dengan kelucuan kalian. Tetap saling sayang ya!
7. Teman-teman main FIFA! (Derandie, Fadhil, Mamiek, Aji) jangan cupu terus.
8. Pasangan koko cici yang jadi teman jalan-jalan (Eben dan Sharon). Cepat pulang dari negeri antah berantah dan main lagi !
9. Untuk mas-mas Jaya Abadi, mas-mas toko sebelah Jaya Abadi, untuk teteh penjual coklat sebelah-sebelahnya Jaya Abadi. *Good Job*
10. Morgenthau, Kenneth Waltz, Robert O. Keohane, George Sorensen, Machiavelli, Adam Smith dan saudara-saudari kalian semua. Terima kasih atas sumbangsih anda dalam ilmu HI.
11. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan penting. Tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai.

12. Untuk Derandie S.IP yang membantu menerjemahkan abstrak. Thanks

*bro!*

13. Untuk Cintia S.IP yang sudah menemani selama kuliah di HI. Terima kasih sudah membantu menyelesaikan tugas dan skripsi, terutama daftar isi penelitian ini. Sukses, cepat kaya, kita jalan-jalan abis itu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini. Akhir kata penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dan ketidak sempurnaan penelitian ini, penulis terbuka akan segala kritik dan saran yang diberikan.

Bandung, 16 Januari 2017

Ferry Wangsa Saputra

## DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	x
Daftar Grafik.....	xi
Daftar Tabel.....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	8
1.2.3 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Kajian Pustaka.....	9
1.5 Kerangka Pemikiran.....	11
1.6 Metodologi Penelitian.....	21
1.6.1 Metode Penelitian.....	21
1.6.2 Jenis Penelitian.....	21
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.7 Sistematika Pembahasan.....	22

## **BAB II G20 SEBAGAI FORUM KERJASAMA EKONOMI ANTAR NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG**

2.1 Faktor Pendorong dan Sejarah Pembentukan G20.....	25
2.1.1 Pembentukan G20 sebagai Respon atas Krisis Ekonomi.....	25
2.1.1.1 Krisis Asia Tahun 1997 sebagai Pemicu Terbentuknya G20.....	25
2.1.1.2 Krisis Amerika Serikat Tahun 2008 sebagai Pemicu KTT G20.....	31
2.1.2 Meningkatnya Peran Negara-Negara <i>Emerging Economy</i> .....	34
2.1.2.1 G7 sebagai Satu-Satunya Forum Elit Global (1973-1999).....	34
2.1.2.2 G20 sebagai Representasi Negara Berkembang dalam Arsitektur Ekonomi Global.....	36
2.2 Keanggotaan G20.....	39
2.2.1 Negara-Negara Maju.....	39
2.2.2 Negara-Negara Berkembang.....	41
2.2.3 Uni Eropa.....	43
2.3 Proses G20.....	45
2.4 Pendekatan Penanganan Krisis.....	49

## **BAB III KRISIS EKONOMI GLOBAL**

2.1. Krisis Ekonomi Asia 1997-1998.....	54
3.1.1 Penyebab Krisis Ekonomi Asia.....	54
3.1.2 Dampak Krisis Ekonomi Asia.....	56
3.1.3 Penanganan Krisis Ekonomi Asia.....	58
3.2 Krisis Ekonomi Amerika Serikat 2007-2008.....	61

3.2.1 Penyebab Krisis Ekonomi Amerika Serikat.....	61
3.2.2 Dampak Krisis Ekonomi Amerika Serikat.....	63
3.2.3 Penanganan Krisis Ekonomi Amerika Serikat.....	68
3.3 Krisis Ekonomi di Eropa.....	72
3.3.1 Penyebab Krisis <i>Eurozone</i> .....	72
3.3.2 Dampak dan Penanganan Krisis di <i>Eurozone</i> .....	78
3.4 Perbandingan Ketiga Krisis.....	81

#### **BAB IV PENYEBAB G20 ENGGAN DALAM MENANGANI KRISIS ZONA EURO**

4.1 Inisiatif untuk Mengembalikan IMF sebagai Lembaga Penanganan Krisis Ekonomi Global.....	84
4.1.1 Kepentingan Negara-Negara BRICS pada Reformasi IMF.....	84
4.1.2 Lemahnya Posisi Amerika Serikat untuk Mengimbangi Kepentingan BRICS dalam IMF.....	87
4.1.3 Pandangan Negara-Negara G20 Lain dalam Melihat IMF.....	89
4.2 Kepentingan Amerika Serikat dan Tanggung Jawab Uni Eropa untuk Menangani Krisis Euro.....	89
4.2.1 Kepentingan AS dalam Penanganan Krisis Euro.....	90
4.2.2 Kepentingan Negara-Negara Euro Zone dan Uni Eropa dalam Penanganan Krisis Euro.....	92
4.3 Kompleksitas Penanganan Krisis Zona Euro dalam Menghadapi Struktur Uni Eropa.....	93
4.3.1 Posisi Yunani sebagai Non-Anggota G20.....	93
4.3.2 Keunikan Sistem Ekonomi Uni Eropa.....	95
4.4 Analisis.....	96

**BAB V KESIMPULAN**

5.1 Kesimpulan.....102

**DAFTAR PUSTAKA.....105**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Negara Anggota G20.....	30
Gambar 2.2 Peta Uni Eropa.....	44
Gambar 2.3 Proses G20.....	48

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perbandingan Ekonomi Negara Berkembang dengan Ekonomi Global.....	38
Grafik 3.1 Tingkat Inflasi Negara-Negara Asia.....	57
Grafik 3.2 Tingkat Pengangguran Negara-Negara Asia.....	57
Grafik 3.3 <i>US Interest Rate</i> 2000-2008.....	62
Grafik 3.4 Penurunan Tingkat GDP Negara Asia.....	64
Grafik 3.5 Hutang Pemerintah Eropa 1982-2011.....	75

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 GDP Negara Maju G20 Tahun 2016.....	40
Tabel 2.2 GDP Negara Berkembang G20 Tahun 2016.....	41
Tabel 2.3 Pembagian Negara G20 ke dalam Kelompok Pemilihan Tuan Rumah...46	
Tabel 3.1 Penurunan Nilai Mata Uang Negara-Negara Afrika.....	66
Tabel 3.2 Penurunan Nilai Pasar Saham Negara-Negara Afrika.....	67
Tabel 3.3 Pinjaman kepada Sektor Privat dari Perbankan Eropa (persen GDP).....	73
Tabel 3.4 Defisit Anggaran Negara Eropa (% GDP).....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang masalah**

Setelah berakhirnya perang dingin, kita dapat melihat bahwa kerjasama antar negara terutama dalam bidang ekonomi menjadi sangat gencar dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari munculnya kerjasama-kerjasama ekonomi yang baru seperti APEC yang bersifat regional, maupun seperti BRICS dan G20 yang keanggotaannya berdasarkan kapasitas ekonominya. Adanya bentuk-bentuk kerjasama ekonomi seperti ini sangat dibutuhkan terutama untuk saling meningkatkan volume perdagangan, saling mengurangi hambatan-hambatan baik tarif maupun non tarif, serta untuk membuat skala kebijakan ekonomi yang lebih luas yang mana akan dapat memenuhi kepentingan bersama negara-negara anggotanya.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya, tentu organisasi-organisasi tersebut akan mengalami berbagai masalah. Masalah yang dihadapi tentu juga cukup beragam, mulai dari hanya masalah perselisihan dagang antar negara, hingga masalah yang lebih besar seperti krisis ekonomi global. Tentu dalam mengatasi masalah krisis yang bersifat global tersebut, kerjasama-kerjasama ekonomi menjadi dibutuhkan mengingat perlunya campur tangan banyak negara dalam mengurai permasalahan yang cukup kompleks tersebut.

---

<sup>1</sup> Martin Feldstein, "Introduction: International Economic Cooperation", University of Chicago Press, 1988, diakses dari <http://www.nber.org/chapters/c9785.pdf> pada 2 Desember 2016

Sejak berakhirnya era perang dingin, setidaknya dunia telah mengalami dua kali masa periode krisis ekonomi. Krisis pertama terjadi pada tahun 1997 dimana melanda negara-negara Asia seperti Indonesia, Korea, Malaysia serta Thailand. Krisis yang bermula akibat jatuhnya mata uang Bath, berhasil memberikan dampak besar terhadap negara-negara di sekitarnya. Dampak yang dihasilkan pun tidak hanya berupa dampak ekonomi, namun juga mempengaruhi politik dalam negeri suatu negara seperti turunnya Presiden Indonesia, Soeharto, akibat gelombang demonstrasi karena kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Di keadaan krisis tersebut, kita dapat melihat peran organisasi Internasional seperti *International Monetary Fund* yang melakukan tindakan cepat seperti memberikan pinjaman besar kepada negara-negara terdampak agar dapat segera memulihkan jatuhnya nilai mata uang, serta untuk kembali memberikan kepercayaan kepada pasar.<sup>2</sup>

Sedangkan periode krisis yang kedua terjadi pada tahun 2008. Berbeda dengan krisis yang terjadi 10 tahun sebelumnya, krisis ekonomi 2008 dimulai dari Amerika Serikat. Penyebab utama terjadinya krisis ini adalah ketika adanya kesalahan sistem keuangan di Amerika Serikat yang sangat leluasa dalam memberikan kredit kepada konsumen yang pada dasarnya memiliki ketidakmampuan untuk membayar konsumsi mereka. Persediaan rumah dan properti di Amerika Serikat yang melonjak, membuat ikut melonjaknya tingkat kredit yang diberikan kepada masyarakat Amerika. Kredit yang seharusnya diberikan secara selektif kepada masyarakat, justru turut diberikan kepada

---

<sup>2</sup> Bijan B. Aghevli, "The Asian Crisis : Causes and Remedies", Finance & Development, IMF, Juni 1999, diakses dari <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/06/aghevli.htm> pada 2 Maret 2016.

masyarakat yang mempunyai *credit score* yang kurang baik. Kredit yang diberikan kepada masyarakat yang tidak layak inilah yang dikenal dengan istilah *subprime mortgage loan*. Bank yang memberikan kredit kepada masyarakat ini memperoleh keuntungan melalui pembayaran hutang sekaligus bunga yang dilakukan oleh masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang melakukan kredit pembelian rumah, maka keuntungan mereka akan semakin meningkat. Untuk dapat terus memberikan pinjaman kepada masyarakat, maka Bank tersebut menjual surat rumah tersebut kepada Bank yang lebih besar. Demikian hal ini terus dilakukan sehingga membuat kredit yang diberikan kepada masyarakat mempunyai resiko yang berdampak besar secara nasional. Masalah terjadi ketika masyarakat yang memang tidak layak mendapat kredit ini, tidak mampu lagi membayar kredit yang ada, serta terjadinya stagnansi nilai harga jual rumah akibat turunnya permintaan akan properti rumah. Masalah ini menimbulkan dampak yang sistemik yang mengakibatkan runtuhnya sistem perekonomian di Amerika Serikat.<sup>3</sup>

Krisis 2008 yang terjadi pada awalnya hanya di Amerika Serikat, mempunyai efek yang cukup besar di banyak negara. Salah satu kawasan terdampak adalah kawasan Eropa yang juga mengalami krisis ekonomi yang sering dikenal dengan *Eurozone Crisis*. Kedua krisis jika dilihat dalam periode waktu yang mana saling berdekatan, maka tidak bisa dikatakan sebagai dua buah krisis yang saling terpisah. Perlambatan ekonomi yang terjadi akibat krisis global 2008

---

<sup>3</sup> “The origins of the Financial crisis”, The Economist, 7 September 2013, diakses dari <http://www.economist.com/news/schoolsbrief/21584534-effects-financial-crisis-are-still-being-felt-five-years-article> pada 2 Juni 2016

mempunyai pengaruh besar yang menyebabkan terjadinya krisis di kawasan Eropa terutama pada negara-negara yang menggunakan mata uang Euro.<sup>4</sup>

Krisis yang terjadi di *eurozone* pada dasarnya merupakan sebuah krisis akibat ketidakmampuan Yunani, kemudian Irlandia, Italy, Spanyol dan Portugal untuk menjaga kesehatan keuangannya. Krisis yang terjadi di negara-negara tersebut tentu tidak hanya berdampak pada level domestik saja, mengingat bahwa terdapat banyak negara yang berhubungan langsung secara ekonomi dengan negara-negara tersebut. Terlebih, adanya penggunaan bersama mata uang Euro di *eurozone* membuat hubungan ekonomi antar negara penggunanya menjadi sangat terikat terutama dalam bidang moneter. Selain itu, hutang yang ditimbulkan dari negara-negara tersebut banyak berasal dari negara-negara *eurozone* seperti German, yang tentu saja dengan ditambah situasi ekonomi internasional yang masih belum pulih paska krisis, akan semakin memperburuk perekonomian di *eurozone*. Akibatnya, krisis ini meluas ke negara-negara Eropa lain yang akhirnya menyebabkan tingginya angka pengangguran di negara-negara tersebut.<sup>5</sup>

Dasar permasalahan dari krisis ini sendiri sebenarnya terjadi pada awal ditetapkannya Uni Eropa dan perancangan akan penggunaan bersama mata uang euro yang ditetapkan dalam *Maastricht Treaty*. Dalam *Maastricht Treaty* sendiri ditetapkan bahwa tiap negara yang akan bergabung ke dalam Uni Eropa harus mempunyai rasio hutang kepada GDP yang tidak melebihi 60% GDP serta tidak memperbolehkan defisit anggaran lebih dari 3% dari GDP. Namun, sejak dari mula,

---

<sup>4</sup> Thanos Skouras, "The euro crisis and its lessons from a Greek perspective", *Society and Economy*, April 2013, hal 54

<sup>5</sup> Philip R. Lane, "The European Sovereign Debt Crisis", *Journal of Economic Perspective*, volume 26, 2012. Hal 50

telah ada pelanggaran atas batas-batas yang telah ditentukan tersebut. Italy, dan Yunani bergabung dengan Uni Eropa dengan kondisi rasio hutang terhadap GDP mencapai 90%, jauh melebihi 60% serta Prancis dan Jerman yang telah mengalami defisit anggaran lebih dari 3%. Hal ini menyebabkan tidak sehatnya sistem keuangan yang ada di *eurozone* dan membuat perbankan di Eropa menjadi sangat rapuh.<sup>6</sup> Selain itu, ketidak disiplin dalam pengelolaan anggaran belanja dan fiskal, dan peminjaman uang yang berlebihan oleh beberapa negara sejak adanya resesi global, membuat negara tersebut tidak lagi mampu untuk mengontrol finansial negaranya.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Deskripsi Masalah**

Krisis yang terjadi di Amerika Serikat dan di Eropa mempunyai pengaruh yang sangat luas bagi ekonomi global. Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dimana fluktuasi perekonomian Amerika Serikat akan sangat berdampak pada ekonomi global. Begitu juga dengan Eropa, sebuah regional dimana terdapat kerjasama ekonomi Uni Eropa yang disertai penggunaan bersama mata uang euro, yang mana gabungan dari negara-negara di dalamnya mampu untuk menyaingi pasar Amerika Serikat. Kedua wilayah tersebut merupakan penggerak utama dari perekonomian dunia yang saling bergantung satu dengan yang lain. Dengan melihat skala pengaruh dari ekonomi kedua negara tersebut terhadap perekonomian global, maka solusi dan penyelesaian yang efektif

---

<sup>6</sup> Thanos Skouras, Loc. Cit.

terhadap krisis yang melanda wilayah tersebut mutlak diperlukan. Salah satu institusi yang fokus dalam menangani krisis adalah G20. G20 merupakan singkatan dari *The Group of Twenty*, sebuah forum yang beranggotakan 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia ditambah dengan sebuah organisasi regional Uni Eropa. Dalam setiap pertemuan yang diadakan, G20 turut mengundang negara-negara tamu dan juga organisasi internasional lain yang juga bergerak dalam bidang ekonomi seperti World Bank, WTO, IMF, ILO dan OECD. G20 dibentuk pada tahun 1999 sebagai respon dari krisis keuangan tahun 1998, dengan bertujuan untuk membentuk sebuah forum tingkat tinggi yang membicarakan tentang kestabilan keuangan global. Pada awalnya, forum tertinggi G20 hanya pada tingkat menteri keuangan saja, hingga tahun 2008, dalam rangka mengatasi kondisi global yang sedang dilanda krisis, G20 membuat *Leader Summit* dengan mengundang seluruh kepala negara atau kepala pemerintahan untuk hadir di Washington.<sup>7</sup>

Dalam menghadapi krisis, G20 memiliki beberapa peran penting. Adanya G20 membuat semakin intensnya koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh para pemimpin ekonomi global dimana dapat meningkatkan respon dalam menghadapi krisis dan juga membuat kebijakan-kebijakan seperti mengurangi hambatan perdagangan antar anggota yang dapat membantu mengurangi masalah krisis. G20 kemudian juga memainkan peranan untuk memperkuat pengawasan terhadap keuangan internasional melalui pembentukan *Financial Stability Board*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> G20 2016 China, “ About G20” , dikutip dari G20 Official Website, [www.g20.org](http://www.g20.org), 27 November 2015

<sup>8</sup> Luka Culo, “Possible Impact of G20 on The Resolution of The Financial Crisis”, *Economic and Social Development: Book of Proceedings*, hal 49

Peran G20 sangat terlihat dalam menangani krisis yang terjadi pada tahun 2008 dimana pada tahun tersebut, untuk pertama kalinya *leader summit* diadakan di Washington dan hanya 6 bulan kemudian, forum tersebut diadakan kembali di London. Pada awalnya, Forum G20 diadakan dua kali dalam setahun sebagai respon atas kondisi krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Hasil yang efektif terlihat pada pertemuan kedua di London dimana para pemimpin G20 berhasil membuat kesepakatan senilai \$1.1 triliun yang diantaranya \$500 miliar digunakan untuk meningkatkan sumber dana IMF untuk dapat membantu negara-negara terdampak krisis, serta \$250 miliar untuk mendorong tingkat perdagangan global. Adapun pertemuan ketiga 6 bulan kemudian dilakukan di New York sudah dipersiapkan untuk melihat progress dari komitmen tersebut.<sup>9</sup>

Namun, tindakan nyata yang dihasilkan forum G20 dalam menghadapi krisis 2008, yang sangat berdampak kepada Amerika Serikat, justru tidak terlihat dalam forum yang sama saat menghadapi krisis yang melanda *eurozone*. G20 dalam *summit* di Mexico tidak mengeluarkan sebuah hasil yang dapat diimplementasikan secara nyata untuk menyelesaikan krisis tersebut. Salah satu hasil dari G20 *Summit* di Mexico adalah dalam poin ke-11 menyatakan

*“Euro Area members of the G20 will take all necessary measures to safeguard the integrity and stability of the area, improve the functioning of financial markets and break the feedback loop between sovereigns and banks. We welcome the significant actions taken since the last summit by the Euro Area to support growth, ensure financial stability and promote fiscal responsibility as a contribution to the G20 framework for strong, sustainable and balanced growth”*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> “G20 leaders seal \$1tn global deal”, BBC News, 2 april 2009, diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7979483.stm> pada 3 Juni 2016

<sup>10</sup> G20 Leaders Declaration”poin ke 11 dalam pernyataan di Los Cabos, Mexico tanggal 18-19 Juni 2012

Dapat dilihat bahwa dalam poin tersebut, G20 lebih menekankan pada penyelesaian masalah krisis *eurozone* itu sendiri dikembalikan kepada Uni Eropa melalui negara-negara Uni Eropa yang tergabung dalam G20. Dalam pernyataan tersebut, G20 terlihat pasif dan hanya melihat masalah krisis tersebut sebagai krisis yang bersifat regional dan juga mengharapkan bahwa masalah tersebut dapat terselesaikan secara regional saja.

Perbedaan penanganan krisis yang dilakukan oleh G20 terhadap krisis 2008 di Amerika Serikat, dengan krisis tahun 2011 di Eropa ini menjadi suatu hal yang menarik dengan melihat bahwa G20 sendiri merupakan sebuah forum yang terbentuk sebagai respon atas krisis pada tahun 1997 dan krisis 2008, yang seharusnya mempunyai konsentrasi lebih dalam menangani krisis yang ada di dunia.

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Masalah dalam penelitian skripsi ini dibatasi pada bagaimana G20 sebagai penanganan krisis enggan dalam menangani krisis *eurozone*, dengan rentang waktu 2008 sampai 2012 dimana tahun 2008 merupakan *leader summit* pertama dari G20 dan tahun 2012 merupakan *leader summit* yang membahas tentang krisis di Eropa.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Bagaimana G20 sebagai penanganan krisis menjadi enggan dalam menangani krisis *eurozone*?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana G20 sebagai penangan krisis menjadi enggan dalam menangani krisis *eurozone*?

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca terkait bagaimana penanganan akan sebuah krisis terutama krisis di *eurozone* dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penanganan krisis tersebut. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian ke depannya yang memiliki kesamaan bidang dengan penelitian ini.

### **1.4 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah sebuah kajian literatur yang dilakukan penulis untuk mengetahui penelitian-penelitian yang pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Kajian pertama diambil dari penelitian Cornelia Laksmi Dewi Supama yang berjudul “Implementasi *Austerity Measures* sebagai Upaya Penanganan Krisis Finansial Yunani”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa *austerity measures* merupakan sebuah upaya dari Uni Eropa untuk Yunani dalam menghadapi krisis di Eropa. *Austerity measures* yang diterapkan di Yunani dalam penelitian ini dinilai kurang tepat untuk menyelesaikan krisis yang terjadi dikarenakan kebijakan ini justru berdampak pada peningkatan pengangguran, korupsi dan kemiskinan.<sup>11</sup>

Kajian kedua diambil dari artikel Zia Qureshi dalam buku *The G8-G20 Relationship in Global Governance* bab 8 dengan judul “G20: From Crisis

---

<sup>11</sup> Cornelia Laksmi Dewi Supama, “Implementasi *Austeirty Measures* sebagai Upaya Penanganan Krisis Finansial Yunani”, 2016, skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan

*Management to Policies for Growth*". Artikel ini menjelaskan tentang perubahan fokus G20 yang awalnya pada merespon krisis finansial global menjadi juga berfokus pada kestabilan pertumbuhan ekonomi global dan lapangan kerja. Perubahan fokus ini terjadi karena adanya kesadaran bahwa untuk menjaga perekonomian global tetap sehat paska krisis, maka G20 juga harus melakukan kebijakan-kebijakan jangka panjang seperti restrukturisasi dan reformasi sistem keuangan dunia secara keseluruhan. G20 dianggap mampu untuk melakukan penguatan ekonomi jangka panjang ini dikarenakan G20 mampu memfasilitasi interaksi berbagai aktor, koordinasi antar kebijakan serta mendorong tindakan kolektif negara-negara di dunia.<sup>12</sup>

Kajian ketiga diambil dari penelitian Frida Filipina Fatalla dari Sigillum Universitatis Islandiae pada tahun 2012 dengan judul "The 2007-2009 Global Financial Crisis : A Research Synthesis". Penelitian ini mempelajari tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2007. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa salah satu penyebab dari krisis finansial global adalah *asset price bubble*. Adanya *asset price bubble* ini bertentangan dengan teori *efficient market* yang berdasarkan pada *the laissez-faire capitalism*, yang mengatakan bahwa pasar bebas akan menciptakan sebuah pasar yang efisien dan tidak dapat menciptakan *asset price bubble*. Selain itu penyebab lain terjadinya krisis tahun 2007 adalah terdapatnya kesalahan pemerintah yang mana tidak memiliki kemampuan untuk memonitor resiko krisis yang sistemik.

---

<sup>12</sup> Zia Qureshi, "G20: From Crisis Management to Policies for Growth", dalam *The G8-G20 Relationship in Global Governance*, 2015, diakses dari <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/G20-From-Crisis-Management-to-Policies-for-Growth.pdf> pada 27 November 2016

Pemerintah yang bekerja dengan pendekatan *laissez faire* gagal untuk dapat menjaga perekonomian yang ada disebabkan oleh minimnya regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Penelitian ini juga memberikan kritik kepada sistem kapitalis yang diterapkan di Amerika Serikat dimana setiap orang berusaha mencari kekayaan sebesar-besarnya tanpa melihat dampaknya kepada orang lain. Akibatnya terjadi ketidakmerataan kekayaan dan munculnya keserakahan yang tidak berpihak kepada *common good*, dan justru membawa perekonomian Amerika ke dalam krisis.<sup>13</sup>

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian tersebut dalam bagian kerangka pemikiran ini. Adanya kerangka pemikiran ini berfungsi sebagai landasan teoritis yang dapat membantu penulis untuk mengarahkan pemikirannya sesuai dengan teori-teori yang sebelumnya telah ada dan menggunakannya sebagai dasar dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan Neo-Liberalisme, terutama Liberal Institusionalisme sebagai salah satu kerangka pemikirannya. Neo-Liberalisme seperti Liberalisme, percaya bahwa sebuah institusi Internasional dapat mempermudah kerja sama yang dilakukan antar negara, namun yang menjadikannya berbeda dengan Liberalisme adalah Neo-Liberalisme tidak mengatakan bahwa institusi tersebut akan mengubah perilaku negara yang pada

---

<sup>13</sup> Frida Filipina, "The 2007-2009 Global Financial Crisis : A Research Synthesis", Sigillum Universitatis Islandiae, Juni 2012

awalnya “liar” menjadi teratur, atau seperti dikatakan Woodrow Wilson, *from a jungle to a zoo*.<sup>14</sup>

Liberal institusionalis juga percaya bahwa adanya sebuah institusi, akan secara otomatis membantu meningkatkan kerja sama antar negara. Sebuah institusi dipercaya dapat mengurangi saling ketidakpercayaan antar negara. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pertukaran informasi antar negara anggotanya, sehingga setiap negara dapat mengetahui tentang negara lain dan membuat masing-masing negara tidak memiliki rasa takut antar satu dengan yang lainnya. Joseph Nye, seorang penganut Neo-Liberalisme juga berpendapat bahwa adanya sebuah institusi antar negara, akan menciptakan sebuah iklim dimana sebuah perdamaian dapat dikembangkan dengan stabil.<sup>15</sup>

Lebih lanjut, kita juga harus memahami konsep dari kerjasama yang dijelaskan oleh Liberal Institusionalis. Keohane melaluinya bukunya yang berjudul *After Hegemony* menjelaskan tentang bagaimana mendefinisikan kerjasama dalam dunia Internasional. Keohane pada awalnya membedakan antara harmoni dengan kerjasama. Harmoni adalah kondisi dimana kebijakan setiap aktor dianggap oleh aktor lain sebagai jalan untuk memenuhi kepentingan aktor lain juga. Dalam harmoni, tidak lagi dibutuhkan kerjasama karna tidak lagi dibutuhkan komunikasi antar aktor untuk memenuhi kepentingannya. Sedangkan konsep kerjasama, terbentuk dari dasar bahwa hubungan antar negara didasari pada konsep dimana kebijakan setiap aktor, dianggap aktor lain sebagai jalan untuk menghambat

---

<sup>14</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, “Introduction to International Relation; Theories & Approaches”, Oxford University Press, 2010, hal 106.

<sup>15</sup> Ibid., hal 108

kepentingan aktor lain tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi, negosiasi dan tawar-menawar antar aktor melalui kerjasama tersebut untuk dapat menyesuaikan kebijakan masing-masing.<sup>16</sup>

Keohane juga berkesimpulan bahwa dengan adanya kerjasama, maka tidak semata-mata dapat menghilangkan konflik, kerjasama tersebut justru merupakan reaksi dari sebuah konflik atau potensi konflik. Tanpa adanya konflik, maka kerjasama menjadi tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, di dalam sebuah institusi yang menjadi tempat negara-negara yang ada dapat bekerjasama, maka akan sangat mungkin kepentingan masing-masing aktor akan muncul dan saling bertentangan satu dengan yang lain. Namun, kepentingan-kepentingan itu dapat dikomunikasikan dan dinegosiasikan dalam sebuah kerjasama untuk mencapai hasil yang dapat memenuhi kepentingan bersama.<sup>17</sup>

Kesadaran akan pentingnya sebuah institusi, mendorong terbentuknya organisasi Internasional. Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari dua atau lebih negara, yang bertindak untuk mencapai kepentingan bersama para anggotanya.<sup>18</sup> Struktur dari sebuah organisasi Internasional terbentuk atas perjanjian bersama para anggotanya.<sup>19</sup>

Salah satu masalah yang akan dihadapi oleh sebuah organisasi adalah krisis. Tentu jika kita kaitkan kepada topik skripsi ini, kita akan lebih membahas kepada

---

<sup>16</sup> Robert O. Keohane, "After Hegemony: Cooperation and Discard in the World Political Economy", Princeton University Press, hal 53

<sup>17</sup> Ibid.,

<sup>18</sup> "Intergovernmental Organization", Harvard Law School, <http://hls.harvard.edu/dept/opia/what-is-public-interest-law/public-international-law/intergovernmental-organizations-igos/> diakses pada 1 April 2016

<sup>19</sup> Clive Archer, "International Organization", Routledge, 2001, hal 30

krisis ekonomi atau krisis finansial. Krisis finansial merupakan sebuah krisis yang membuat perekonomian negara yang terdampak, menuju sebuah jurang resesi yang dalam. Sebuah krisis finansial yang terjadi di suatu negara, biasanya bersifat mudah menyebar ke negara-negara lain. Oleh karena itu, penanganan sebuah krisis diperlukan sebuah kebijakan yang bersifat cepat dan efektif.<sup>20</sup>

Sebuah krisis finansial yang terjadi, sebagian besar terjadi karena adanya ketidaksinambungan kebijakan makroekonomi sebuah negara. Selain itu faktor-faktor seperti peningkatan pemberian kredit yang berlebihan oleh perbankan serta hutang publik yang tidak terkontrol juga memberikan andil terhadap sebuah krisis. Penyebab krisis finansial itu sendiri pun terkadang tidak disebabkan oleh bidang finansial itu sendiri. Adanya pengaruh dari bidang politik juga dapat menghambat kebijakan-kebijakan yang dapat menjaga kestabilan sebuah perekonomian.<sup>21</sup>

Krisis finansial berdasarkan IMF, setidaknya dibagi menjadi tiga jenis yaitu krisis perbankan, krisis mata uang dan krisis akibat hutang luar negeri. Krisis perbankan adalah sebuah krisis yang bersifat sistemik, dimana perusahaan-perusahaan dan sektor finansial di suatu negara mengalami kegagalan dalam membayar kontrak atau perjanjian yang mereka lakukan. Krisis ini biasanya dimulai dengan hilangnya kepercayaan para konsumen bank hingga menarik uangnya dari bank tersebut. Krisis ini juga disertai dengan jatuhnya harga atau nilai aset seperti harga *real estate*.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Luc Laeven dan Fabian Valencia, "Systemic Banking Crises : A New Database", IMF Working Paper, 2008, hal 3

<sup>21</sup> Ibid.,

<sup>22</sup> Ibid., hal 6

Sedangkan krisis mata uang adalah krisis akibat terdepresiasi nilai nominal dari sebuah mata uang setidaknya 30 persen jika berdasarkan standar dari IMF. IMF mencatat bahwa krisis mata uang setidaknya telah terjadi 208 kali dalam rentang waktu 1970-2007.<sup>23</sup> Dan krisis yang ketiga adalah krisis akibat hutang luar negeri. Hutang ini terjadi karena sebuah negara tidak mampu membayar hutang publiknya dan harus melakukan peminjaman ke luar negeri. Krisis ini mulai terjadi apabila negara tersebut telah mencapai tingkat hutang yang tinggi, namun mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dalam beberapa kasus, ada kecenderungan bahwa krisis ini terjadi setelah ada sebuah lonjakan ekonomi. Ketika ekonomi suatu negara bertumbuh pesat, pemerintah mendapatkan banyak penghasilan dari pajak seperti pajak pendapatan, pajak dari konsumsi rakyatnya, pajak dalam transaksi sebuah aset dan lain-lain. Kesalahan pemerintah terjadi ketika mereka memutuskan untuk memotong pajak dan melakukan pembiayaan proyek jangka panjang melalui peminjaman luar negeri. Ketika lonjakan ekonomi yang terjadi berhenti, maka pemerintah akan mengalami masalah yaitu berubahnya keadaan finansial mereka yang awalnya surplus, menjadi defisit. Hal tersebut membuat pemerintah mau tidak mau harus menambah hutang kembali yang dapat berujung pada sebuah krisis.<sup>24</sup>

Pandangan lain tentang hutang luar negeri dijelaskan oleh Michael Tomz dalam working papernya di Federal Reserve Bank of Chicago. Hutang luar negeri atau *sovereign debt* merupakan salah satu hal yang penting dalam pertumbuhan

---

<sup>23</sup> Ibid., hal 6

<sup>24</sup> Hao Li, "What is a Sovereign Debt Crisis? Why is it so Scary?", *Internasional Business Times*, 2011, diakses dari <http://www.ibtimes.com/what-sovereign-debt-crisis-why-it-so-scary-372228> pada 5 April 2016

ekonomi global. Hutang luar negeri diperlukan bagi negara-negara untuk mendorong peningkatan ekonomi di negara tersebut. Ketika sebuah negara mempunyai hutang luar negeri, dan mampu untuk mengolah hutang tersebut dan berhasil meningkatkan asetnya, maka persentase hutang tersebut terhadap asetnya akan menurun dan hutang tersebut tidak akan menjadi sebuah beban bagi negara tersebut. Namun, apabila hutang tersebut tidak diolah dengan baik ataupun adanya situasi eksternal yang membuat sebuah negara tidak dapat meningkatkan asetnya, maka justru utang tersebut akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut. Michael Tomz juga menjelaskan tentang apa yang mewajibkan sebuah negara harus membayar hutang luar negerinya. Menurutnya, sebuah negara meskipun tidak dapat dipaksa untuk membayar hutangnya, mengingat negara sebagai entitas tertinggi dalam dunia internasional, namun akan tetap membayar hutangnya untuk tetap mempertahankan aksesnya terhadap perekonomian dunia dan perdagangan internasional, selain itu pembayaran hutang juga diperlukan untuk menjaga reputasi sebuah negara dalam hubungan internasional.<sup>25</sup>

Dalam membahas tentang krisis di *eurozone*, kita juga tidak bisa terlepas dari konsep konsolidasi fiskal yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa. Menurut OECD, konsolidasi fiskal adalah sebuah kebijakan konkrit yang bertujuan untuk mengurangi defisit dan hutang pemerintah. Rencana konsolidasi yang dibuat, dibuat dengan persen dalam nominal GDP. Defisit pemerintah dapat dikurangi

---

<sup>25</sup> Michael Tomz dan Mark L.J. Wright, "Empirical Research on Sovereign Debt and Default", Federal Reserve Bank of Chicago, 2012, hal 22

dengan cara meningkatkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. OECD membagi empat kategori negara dalam melakukan strategi konsolidasi fiskal :

1. *Consolidation under market pressure*, yaitu konsolidasi yang dilakukan oleh negara yang mempunyai prospek pertumbuhan finansial yang buruk dan memerlukan pengumuman akan strategi kebijakan konsolidasi fiskalnya yang bertujuan untuk menenangkan situasi pasar dalam jangka pendek. Contoh negara yang melakukan konsolidasi ini adalah Yunani, Portugal dan Spanyol
2. *Pre-emptive consolidation*, yaitu konsolidasi yang dilakukan negara-negara sebagai tindakan preventif dan dilakukan lebih kepada alasan domestik. Tujuan dari konsolidasi ini adalah untuk memberi signal kepada pasar dan publik bahwa pemerintah memperhatikan situasi fiskal yang ada dan ingin menjaga keseimbangan fiskal jangka panjang. Konsolidasi ini dilakukan oleh negara-negara untuk mengurangi perbandingan *debt-to-GDP ratio* dari yang ditetapkan maksimum sebesar 60% menjadi sekitar 50%. Contoh negara yang melakukan konsolidasi ini adalah Jerman, Belanda dan Inggris.
3. *Consolidation needed but no substantial consolidation plan announced yet*, yaitu konsolidasi yang dilakukan negara-negara yang membutuhkan konsolidasi fiskal, namun belum harus mengumumkan konsolidasi yang bersifat lebih detail. Negara-negara dalam kategori ini memilih untuk menunda pengumuman akan konsolidasi sampai pemulihan ekonomi

menjadi bersifat *self-sustaining*. Contoh negara yang melakukan konsolidasi ini adalah Amerika Serikat dan Jepang

4. *Comparatively low fiscal consolidation needs*, yaitu negara-negara yang cenderung mempunyai fiskal yang sehat dan tidak terlalu membutuhkan konsolidasi fiskal untuk mengurangi defisit maupun *debt-to-GDP ratio*. Contoh negara dalam kategori ini adalah Australisa, Korea, Swiss dan Swedia.<sup>26</sup>

Ketika membahas sebuah forum atau institusi yang berisi hanya sejumlah negara yang dianggap dapat merepresentasikan negara-negara secara global, maka kita akan menggunakan *club theory* yang dikemukakan Robert Keohane sebagai konsep dasarnya. Teori ini dapat menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan krisis. Keohane membahas bahwa institusi internasional yang ada, digerakkan dari sekelompok orang yang berlatar belakang sama saja, contohnya adalah bagaimana GATT atau WTO saat ini, dikendalikan oleh para menteri perdagangan, kemudian IMF dikendalikan oleh para menteri keuangan. Selain itu, terdapat juga club yang terdiri hanya dari segelintir negara saja namun juga mempunyai pengaruh yang besar dalam dunia internasional. *Club theory* menjelaskan bahwa mereka yang tergabung dalam sebuah kelompok atau klub ini, dapat bekerja secara tertutup dari publik dan baru kemudian melaporkan hasilnya kepada publik. Hal ini membuat mereka dapat bekerja secara efektif dengan cara membuat diri mereka eksklusif dari

---

<sup>26</sup> OECD, "Fiscal consolidation: targets, plans and measures", OECD Journal on Budgeting, Vol11/2, diakses dari <https://www.oecd.org/gov/budgeting/Fiscal%20Consolidation%20Targets,%20Plans%20and%20Measures.pdf> pada 5 Juni 2016

kelompok-kelompok lain yang mempunyai latar belakang berbeda, serta membuat hasil negosiasi yang mereka lakukan tidak dapat dikonfrontasi oleh publik. Keadaan negosiasi yang tertutup ini membuat publik tidak dapat memahami bagaimana keadaan sebenarnya dalam negosiasi tersebut, dan membuat kelompok orang tersebut sulit untuk dimintai pertanggung-jawaban atas apa yang dilakukannya. Hal ini berhasil memberikan hasil yang cukup baik jika dilihat dari perspektif kerjasama multilateral dimana dunia menjadi lebih damai dan sejahtera dari praktik *Club model* ini.<sup>27</sup>

Untuk lebih memahami pertanyaan penelitian, penulis juga menjelaskan konsep dari keengganan yang dikemukakan oleh Sandra Destradi dalam jurnalnya berjudul *Reluctant in international politics: A conceptualization*. Sandra menjelaskan bahwa konsep dari keengganan atau *Reluctance* merupakan gabungan dari konsep *hesitation* atau keragu-raguan dan konsep *recalcitrance* atau keadaan yang bersifat melawan. Konsep *hesitation* pun mempunyai beberapa kriteria seperti *lack of initiative* dan *delaying*, sedangkan konsep *recalcitrance* mempunyai kriteria seperti *ignoring requests* dan *rejecting requests*. Konsep keengganan ini memberikan kita sebuah alat analisis yang diperlukan untuk mempelajari berbagai macam kebijakan luar negeri yang mana semakin membutuhkan penjelasan tentang keragu-raguan yang dilakukan oleh sebuah aktor tertentu. Sandra juga menjelaskan

---

<sup>27</sup> Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, "Between Centralization and Fragmentation: The Club Model of Multilateral Cooperation and Problems of Democratic Legitimacy", John F. Kennedy School of Government, Februari 2001, hal 2-3

bahwa secara garis besar keengganan merupakan adanya sebuah ketiadaan respon dalam memberikan respon yang dibutuhkan oleh situasi global.<sup>28</sup>

Konsep kepentingan nasional pun juga menjadi penting dalam penelitian ini dimana kepentingan nasional menjadi salah satu unsur jawaban dari pertanyaan penelitian. J. Peter Pham dalam artikelnya yang membahas konsep kepentingan nasional menurut Hans Morgenthau menjelaskan bahwa kepentingan nasional adalah bukan hanya sebuah keperluan politik, melainkan adalah sebuah kewajiban moral yang harus diikuti dan dijadikan panduan dalam berhubungan dengan negara lain. Kepentingan nasional juga menjadi standar dari keputusan dan kebijakan yang dibutuhkan dalam diplomasi untuk meminimalisasi konflik kepentingan dengan aktor lain. Memperjuangkan kepentingan nasional dibutuhkan untuk tetap mempertahankan eksistensi sebuah negara dalam dunia internasional.<sup>29</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang liberalisme institusionalis, maka sebuah institusi Internasional akan dipandang penting dalam mengatasi masalah seperti krisis finansial. Krisis yang bersifat sistemik dan sangat berpotensi untuk mempengaruhi perekonomian negara lain, menunjukkan bahwa penanganan sebuah krisis, bukanlah masalah yang hanya di hadapi oleh sebuah negara terdampak saja, melainkan juga harus dihadapi negara-negara lain yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung. Sudut pandang liberalisme institusionalis juga menekankan pada masih adanya kepentingan di dalam setiap perwujudan kerjasama, dimana kerjasama tersebut dianggap mampu untuk menyatukan

---

<sup>28</sup> Sandra Destradi, "Reluctance in International Politics: A Conceptualization", German Institute of Global and Area Studies, 2006, hal 20-23

<sup>29</sup> J. Peter Pham, "What is in the National Interest? Hans Morgenthau's Realist Vision and American Foreign Policy", *American Foreign Policy Interest*, 2008, hal 258

kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Pembentukan sebuah institusi sebagai sebuah *arena* atau forum merupakan sebuah sarana bagi negara-negara untuk dapat duduk bersama mencari solusi bagi krisis tersebut. Adanya kesadaran akan sifat dari ekonomi yang saling bergantung antar suatu negara dengan negara lain, bahkan saling berkaitan di seluruh dunia, membuat dalam penanganannya juga diperlukan sebuah institusi yang dapat menyediakan forum yang bersifat global. Forum global ini mutlak diperlukan untuk dapat mewakili berbagai aktor-aktor negara yang ada dan juga organisasi-organisasi yang bersifat regional maupun yang bersifat spesifik seperti organisasi yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Penelitian ini menggunakan teori sebagai landasan untuk membantu menganalisa hasil dari temuan penelitian. Metode ini juga lebih menekankan pada pengertian dan pemahaman yang mendalam pada suatu masalah.<sup>30</sup>

### **1.6.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian melalui pencarian unsur-unsur, ciri-ciri dan sifat suatu fenomena. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, menganalisanya serta menginterpretasikannya<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> G.R. Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", dalam Makara, Sosial Humaniora, Vol 9, No2, Desember 2005.

<sup>31</sup> Suryana, "Metode Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", Universitas Pendidikan Indonesia, 2010

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari orang atau peneliti sebelumnya yang membahas sesuatu yang mempunyai kaitan dengan permasalahan. Data yang dikumpulkan dapat berupa jurnal, buku, berita, dan lainnya.<sup>32</sup>

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Secara umum penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab. Bab I akan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

Bab II akan membahas tentang profil dari G20. Pada bab ini akan dibahas sejarah pembentukan dari G20, keanggotaan dari G20, proses yang ada di dalam G20 serta metode penanganan krisis G20. Dalam bab ini akan ditunjukkan bahwa benar G20 merupakan sebuah forum yang terbentuk untuk menangani krisis ekonomi di dunia.

Bab III akan membahas tentang krisis finansial yang terjadi di Asia, Amerika Serikat dan di *eurozone*. Bab ini akan menjelaskan tentang perbedaan antar krisis yang terjadi. Selain itu pada bab ini juga akan dijelaskan penyebab utama terjadinya krisis ini dan juga bagaimana pengaruhnya kepada negara-negara yang berhubungan dengan krisis tersebut, serta penanganan terhadap krisis tersebut. Tujuan dari bab ini adalah untuk melihat perbandingan dari G20 dalam merespon krisis-krisis ekonomi global yang terjadi di dunia.

---

<sup>32</sup> Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", Bandung : Alfabeta, 2009, hal 225

Bab IV akan membahas tentang jawaban atas pertanyaan penelitian yaitu bagaimana G20 sebagai penangan krisis menjadi enggan dalam menangani krisis zona euro. Adapun penulis menemukan setidaknya tiga faktor yang dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut yaitu yang pertama, adanya inisiatif untuk mengembalikan IMF sebagai lembaga penangan krisis ekonomi global, kedua adalah adanya kepentingan Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam menyelesaikan krisis tersebut dan ketiga adalah adanya hambatan struktural bagi G20 dalam menangani krisis tersebut.

Bab V akan memaparkan penemuan-penemuan hasil penelitian dan menyimpulkan kembali jawaban dari pertanyaan penelitian ini.